

# **DISERTASI**

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, FISKAL STRESS DAN  
KINERJA KEUANGAN TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
MELALUI KETIMPANGAN PENDAPATAN DAN PERTUMBUHAN  
EKONOMI DI KOTA MAKASSAR**

***THE EFFECT OF FISCAL DECENTRALIZATION, FISCAL STRESS AND  
FINANCIAL PERFORMANCE ON COMMUNITY WELFARE THROUGH  
INCOME INEQUALITY AND ECONOMIC GROWTH IN MAKASSAR  
CITY***

**A. ATO RAKHMAWAN  
A013211020**



**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

# **DISERTASI**

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, FISKAL STRESS DAN  
KINERJA KEUANGAN TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
MELALUI KETIMPANGAN PENDAPATAN DAN PERTUMBUHAN  
EKONOMI DI KOTA MAKASSAR**

***THE EFFECT OF FISCAL DECENTRALIZATION, FISCAL STRESS AND  
FINANCIAL PERFORMANCE ON COMMUNITY WELFARE THROUGH  
INCOME INEQUALITY AND ECONOMIC GROWTH IN MAKASSAR  
CITY***

disusun dan diajukan oleh

**A. ATO RAKHMAWAN**

**A013211020**



**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

## DISERTASI

### PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, FISKAL STRESS DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI KETIMPANGAN PENDAPATAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh:

A. ATO RAKHMAWAN  
A013211020

telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin pada tanggal **8 Agustus 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

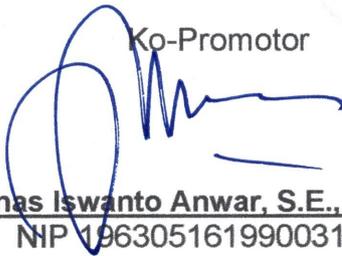
Menyetujui,

Promotor



Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si., Ak., CA  
NIP 196406091992031003

Ko-Promotor



Dr. Anas Iswanto Anwar, S.E., M.A., CWM  
NIP 196305161990031001

Ko-Promotor



Dr. Hamrullah, S.E., M.Si  
NIP 196812211995121001

Ketua Program Studi,



Dr. Madris, SE., DPS., M.Si., CWM  
NIP 196012311988111002

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,



Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM  
NIP 196402051988101001

## DISERTASI

### PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, FISKAL STRESS & KINERJA KEUANGAN TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI KETIMPANGAN PENDAPATAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

**A. ATO RAKHMAWAN**

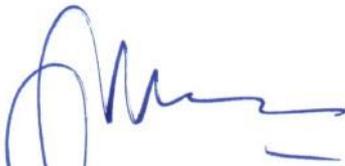
**A013211020**

Telah dipertahankan dalam sidang ujian disertasi  
pada tanggal Juli 2024 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Tim Promotor



Prof. Dr. Arifuddin., S.E., M.Si., Ak, CA  
Promotor



Dr. Anas Iswanto Anwar S.E, M.A., CWM  
Kopromotor I



Dr. Hamrullah SE., M.Si.  
Kopromotor II

Ketua Program Studi  
Ilmu Ekonomi



Dr. Madris, SE., DPS., M.Si., CWM

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya bertanda tangan di bawah ini,

Nama : A. Ato Rakhmawan

NIM : A013211020

Program studi/jenjang : Doktor Ilmu Ekonomi (S3)

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa disertasi yang berjudul

### **Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Fiskal Stress dan Kinerja Keuangan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Ketimpangan Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah disertasi ini terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diikuti dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Makassar, 20 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



**A. Ato Rakhmawan**

## PRAKATA

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, karena dengan limpahan RAHMAT, pertolongan dan hidayah-Nya, sehingga disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Disertasi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Doktor pada Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.

Dalam proses penyelesaian Pendidikan Program Doktor ini, banyak pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam memberikan dorongan, arahan dan bimbingan, untuk itu dalam prakata ini dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada:

Prof. Dr. Arifuddin., S.E., M.Si., Ak, CA selaku Promotor. Ditengah kesibukan beliau sebagai Guru Besar di Universitas Hasanuddin Makassar, beliau masih meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis. Demikian pula dengan Dr. Anas Iswanto Anwar S.E, M.A., CWM selaku Ko-promotor I dan Dr. Hamrullah SE., M.Si. selaku Ko-promotor II. Dosen senior yang sangat dihormati, beliau begitu sabar, cermat dan penuh perhatian membimbing, memberi motivasi, serta meluangkan waktu untuk berdiskusi, semoga beliau-beliau dimudahkan dalam pengurusan Guru Besar.

Ketua Program Studi S3 Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin, Dr. Madris, SE., DPS., M.Si., CWM yang telah memberikan bantuan dan fasilitas selama belajar di Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Kepada para penguji yang telah memberikan masukan, perhatian, kritik dan sarannya untuk penyempurnaan disertasi ini. Kepada teman-teman dan rekan kerja dari Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam BAPPEDA Kota Makassar yang turut memberikan bantuan dan dukungan selama penelitian disertasi ini.

Terakhir, ucapan terima kasih kepada Ibu dan Bapak saya beserta saudara peneliti atas bantuan, nasihat, dan motivasi yang diberikan selama penelitian disertasi ini, serta orang special yang selalu menemani saya dalam Proses penyelesaian Doktor ini (RAN). Semoga semua pihak mendapat kebaikan dari-Nya atas bantuan yang diberikan hingga disertasi ini terselesaikan dengan baik.

Disertasi ini masih jauh dari sempurna, apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam disertasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan disertasi ini.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>I</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian .....	17
1.4 Kegunaan Penelitian.....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep.....	20
2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory).....	20
2.1.2 Teori Fiscal Federalisme .....	21
2.1.3 Kesejahteraan Masyarakat.....	23
2.1.3.1 Teori Kesejahteraan Masyarakat.....	24
2.1.4 Desentralisasi Fiskal.....	25
2.1.5 Fiscal Stress.....	27
2.1.6 Kinerja Keuangan.....	29
2.1.6.1 Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah .....	30
2.1.7 Ketimpangan Pendapatan.....	32
2.1.8 Pertumbuhan Ekonomi .....	35
2.1.8.1 Teori Neo Klasik .....	37
2.1.8.2 Teori Klasik.....	38
2.1.8.3 Teori Rostow dan Musgrave.....	39
2.1.8.4 Teori Pertumbuhan Endogen.....	39
2.2 Hubungan Antar Variabel.....	40

2.2.1	Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat .....	40
2.2.2	Pengaruh Fiskal Stress Terhadap Kesejahteraan Masyarakat .....	41
2.2.3	Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat .....	42
2.2.4	Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat .....	43
2.2.5	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat .....	44
2.3	Tinjauan Empiris .....	47
<b>BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS .....</b>		<b>52</b>
1.1	Kerangka Konseptual.....	52
1.2	Hipotesis .....	59
<b>BAB IV METODE PENELITIAN .....</b>		<b>61</b>
4.1	Rancangan Penelitian.....	61
4.2	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	62
4.3	Jenis dan Sumber Data.....	62
4.4	Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data .....	62
4.5	Metode Analisis Data .....	63
4.5.1	Variabel Penelitian.....	63
4.5.2	Model dan Teknik Analisis Data .....	64
4.5.2.1	Model Analisis Data.....	64
4.5.2.2	Teknik Analisis Data .....	65
4.6	Definisi Operasional Variabel.....	70
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>75</b>
5.1	GAMBARAN PEREKONOMIAN KOTA MAKASSAR.....	75
5.2	Hasil Penelitian .....	80
5.3	Hasil Kerangka Penelitian .....	93
5.4	Pembahasan.....	93
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>		<b>127</b>
6.1	Kesimpulan .....	127
6.2	Implikasi .....	135

6.3 Keterbatasan Penelitian .....	136
6.4 Saran .....	137
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>140</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>152</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 5. 1 Uji Normalitas .....	80
Tabel 5. 2. Uji Heteroskedastisitas Breusch Pagan Godfrey.....	81
Tabel 5. 3. Uji Autokorelasi .....	82
Tabel 5. 4 Uji Multikolinieritas .....	83
Tabel 5. 5 Hasil Uji Regresi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia ...	83
Tabel 5. 6 Hasil Uji Regresi Terhadap Ketimpangan Pendapatan (GR) ..	86
Tabel 5. 7 Hasil Uji Regresi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE).....	88
Tabel 5. 8 Hasil Uji Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan.....	89
Tabel 5. 9 Hasil Sobel Test.....	90

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kerangka Konsep.....	58
Gambar 4. 1 Diagram Jalur.....	65
Gambar 5. 1 Hasil Kerangka Penelitian .....	93

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Peta Teori .....	152
Lampiran 2 Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar Tahun 2005-2022..	164
Lampiran 3 Desentralisasi Fiskal Kota Makassar Tahun 2005-2022 .....	165
Lampiran 4 Fiskal Stress Kota Makassar Tahun 2005-2022.....	166
Lampiran 5 Kinerja Keuangan Kota Makassar Tahun 2005-2022.....	167
Lampiran 6 Output Eviews 12 dan Sobel Test .....	168

## ABSTRACT

ATO RAKHMAWAN. *The Effect of Fiscal Decentralization, Fiscal Stress and Financial Performance on Community Welfare through Income Inequality and Economic Growth in Makassar City* (supervised by Arifuddin, Anas Iswanto Anwar, Hamrullah)

The research aims to describe the effect of the fiscal decentralization, fiscal stress, financial performance on the public welfare through the income inequality and economic growth in Makassar City. The research was conducted in Makassar City using the secondary data in the form of time series from 2005 to 2022 obtained from Bappeda and BPS Makassar City. The data analysis method used for this research model was the time series data regression model assisted by the eviews 12 application. The research result indicates that the fiscal decentralization affects the public welfare and economic growth, but has no effect on the income inequality. The fiscal stress affects the people's welfare, but has no influence on the income inequality and economic growth. The financial performance affects the income inequality, but has no effect on the economic growth and community welfare. The income inequality has no influence on the community welfare. The economic growth affects the public welfare and income inequality. The income inequality cannot mediate the effect between the fiscal decentralization and fiscal stress on the public welfare, it can only mediate financial performance. The economic growth can mediate the effect between the fiscal decentralization and financial performance on the public welfare and cannot mediate fiscal stress. The research concludes that the public welfare as measured by HDI can be improved directly through increasing the fiscal decentralization and economic growth as well as reducing the fiscal stress.

Key words: fiscal decentralization, fiscal stress, financial performance, income inequality, economic growth, public welfare



## ABSTRAK

ATO RAKHMAWAN. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Fiskal Stress, dan Kinerja Keuangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Ketimpangan Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar* (dibimbing oleh Arifuddin, Anas Iswanto Anwar, dan Hamrullah).

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal, fiskal stress, dan kinerja keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar. Penelitian dilaksanakan di Kota Makassar dengan menggunakan jenis data sekunder dalam bentuk lima series dari tahun 2005 – 2022. Data didapatkan dari Bappeda dan BPS Kota Makassar. Data dianalisis menggunakan model regresi dalam lima series dibantu aplikasi eviews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, namun tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Fiskal stress berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, namun tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Kinerja keuangan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, namun tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan tidak dapat memediasi pengaruh antara desentralisasi fiskal dan fiskal stress terhadap kesejahteraan masyarakat, hanya dapat memediasi oleh kinerja keuangan. Pertumbuhan ekonomi dapat memediasi pengaruh antara desentralisasi fiskal dan kinerja keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat dan tidak dapat memediasi fiskal stress. Dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui IPM dapat ditingkatkan secara langsung melalui peningkatan desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi serta penurunan fiskal stress.

Kata kunci: desentralisasi fiskal, fiskal stress, kinerja keuangan, ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah dalam mengimplementasikan program pembangunan di tuntut berperan penting, strategis dan utama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan yang dilakukan negara saat ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat, program pembangunan pada sektor-sektor yang berkaitan dengan layanan sosial kemasyarakatan, seperti pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan bidang sosial kemasyarakatan lainnya merupakan bentuk perhatian pemerintah secara langsung untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Aspek pembangunan manusia menjadi salah satu indikator dalam menentukan kemajuan dari suatu daerah (Dianaputra dan Aswitari, 2017). Mirza (2011) menyatakan bahwa IPM merupakan salah satu tolak ukur dalam melihat kualitas hidup manusia yang diukur melalui kualitas kesehatan, tingkat pendidikan dan ekonomi (daya beli). Tercapainya tujuan pembangunan manusia yang tercermin pada IPM, sangat tergantung pada komitmen pemerintah sebagai penyedia sarana penunjang (Rustariyuni, 2014). Dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut, terdapat beberapa indikator yang umum digunakan, salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM adalah indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPM

mencerminkan keberhasilan suatu negara dalam meningkatkan modal manusia berdasarkan tiga aspek pembentuk IPM. Semakin tinggi IPM merepresentasikan pembangunan modal manusia yang semakin baik.

Capaian pembangunan manusia kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan cukup bervariasi. Pada periode 2016-2021 daerah yang mencapai IPM tertinggi adalah Kota Makassar, Kota Palopo dan Kota Pare-Pare. Sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar merupakan pusat dari seluruh kegiatan, baik pendidikan, perekonomian, hiburan, pemerintahan dan lain sebagainya. Sarana dan prasarana Kota Makassar cukup memadai dalam mendukung pencapaian pembangunan manusia. Akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan sangat mudah dan terjangkau. Sedangkan daerah yang mencapai IPM terendah selama periode 2016-2021 adalah Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Takalar. Jika diklasifikasikan dalam kategori tinggi rendahnya IPM kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama 2016-2021 hanya 7 kabupaten/kota yang berada dalam kategori tinggi salah satunya Kota Makassar dan 17 kabupaten kategori sedang. Kemudian pada periode 2021-2023 Kota Makassar masih di kategori paling tinggi diantara kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 83,52 di tahun 2023. Namun jika dibandingkan dengan IPM di kota lain, Kota Makassar masih dibawah, seperti IPM di Kota Semarang yang mencapai 84,43 di tahun 2023, Kota Surabaya 83,99, bahkan Kota Palu 83,71.

Pembangunan di Indonesia gagal disebabkan oleh kebijakan yang menyimpang (*misleading policy*) membawa dampak meluasnya ketimpangan pembangunan antar wilayah dan antar kelompok pendapatan. Keadaan ini akan terus menerus memberikan ancaman dan membayangi proses pembangunan di Indonesia sehingga rentan terhadap guncangan yang secara berulang akan menimbulkan krisis ekonomi, sosial dan politik yang menyebabkan kesengsaraan pada sebagian besar anak bangsa di Indonesia.

Otonomi daerah yang merupakan salah satu agenda reformasi digunakan untuk meredam berbagai gejolak yang diakibatkan oleh ketimpangan pembangunan antar daerah. Diharapkan dengan kebijakan desentralisasi fiskal melalui perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 (yang mencabut UU No. 33 tahun 2004 dan UU No. 28 tahun 2009), akan terjadi rasa keadilan antar daerah serta pemerataan pembangunan antar wilayah sehingga ketimpangan pembangunan dapat dikurangi.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dan mendorong pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, maka diberlakukan desentralisasi fiskal yang diatur dalam UU Nomor 1 tahun 2022. Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dalam implementasinya desentralisasi fiskal mengatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Perimbangan keuangan tersebut merupakan salah satu pilar

penting dalam rangka mendorong terjadinya rasa keadilan antar daerah serta pemerataan pembangunan antar wilayah sehingga ketimpangan pembangunan selama ini dapat dikurangi. Hal ini sesuai dengan *The Second Fundamental of Welfare Economics* yang menyatakan bahwa sebenarnya pemerintah dapat memilih target pemerataan ekonomi yang diinginkan melalui transfer, perpajakan dan subsidi sedangkan ekonomi selebihnya dapat diserahkan melalui mekanisme pasar.

Berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2002 perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah mempunyai tujuan memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggung jawab serta mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah. Dengan kebijakan otonomi daerah diikuti oleh kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan akan terjadi pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia sudah dilakukan sejak tanggal 1 Januari 2001. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Diharapkan dengan adanya otonom dan desentralisasi fiskal dapat lebih pemeratakan pembangunan sesuai dengan keinginan

daerah untuk mengembangkan wilayah menurut potensinya masing-masing.

Desentralisasi fiskal akan memberikan manfaat yang optimal jika diikuti oleh kemampuan finansial yang memadai oleh daerah otonom. Menurut UU Nomor 1 tahun 2022 sumber penerimaan yang digunakan untuk pendanaan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana bagi hasil, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah.

Berdasarkan data lima tahun terakhir, pengelolaan instrument yang digunakan pemerintah Kota Makassar untuk pembangunan dan mendorong perekonomian terlihat fluktuatif di mana pada tahun 2019 pendapatan daerah Pemerintah Kota Makassar mencapai 3,6 triliun rupiah, tahun 2020 mengalami penurunan ke angka 3,3 triliun rupiah yang dikarenakan adanya pandemi Covid-19 dan tahun 2021 mengalami penurunan lagi hingga 3,2 triliun rupiah. Namun di tahun 2022 sudah mengalami kenaikan hingga 3,5 triliun rupiah.

*Fiscal Stress* atau tekanan fiskal merupakan salah satu masalah yang dapat menghambat proses pembangunan suatu daerah. *Fiscal Stress* dapat diartikan sebagai kondisi defisit anggaran. Hal tersebut terjadi apabila pemerintah daerah tidak mampu membiayai belanja daerah secara mandiri. Dengan kata lain, disaat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi salah satu sumber penerimaan daerah tidak dapat memenuhi belanja modal,

maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai kondisi *Fiscal Stress*. Kondisi *Fiscal Stress* dapat diatasi apabila setiap daerah dapat menggali potensi yang dimiliki secara maksimal sehingga dalam mencukupi belanja daerah tidak bergantung pada dana transfer dari pusat. Cara lain untuk mengatasi terjadinya *Fiscal Stress*, dapat dengan melakukan minimalisasi pembiayaan daerah sehingga anggaran daerah tidak mengalami defisit. Terjadinya *Fiscal Stress* dapat diantisipasi dengan memperhatikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pertumbuhan pendapatan daerah di Kota Makassar mulai dari tahun 2017 mengalami penurunan hingga mencapai angka minus (-9.35) di tahun 2020 ketika dunia dilanda Covid-19 termasuk Kota Makassar.

Pemerintah melakukan intervensi pada perekonomian berupa penyediaan barang dan pelayanan publik dalam upaya untuk mengatasi kegagalan pasar, tetapi efisiensi pengadaan tersebut akan terjadi pada tingkat pemerintahan yang lebih rendah karena mempunyai banyak informasi terkait keinginan dan kebutuhan masyarakat tersebut. Selain itu, respon yang akan ditanggap dalam mengatasi permasalahan daerah akan lebih cepat jika ditangani oleh pemerintah daerah seperti pemerintah kota atau Pemerintah Kabupaten. Oleh karena itu, konsep *fiscal federalism* memiliki sudut pandang dimana derajat efisiensi dalam penyediaan pelayanan publik akan meningkat serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah ketika hal tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penerapan desentralisasi (Oates, 1972) (Tiebout, 1956).

Khusaini (2018) menjelaskan bahwa terdapat tujuh prinsip penerimaan daerah yang baik dalam sebuah pengelolaan keuangan daerah, yaitu korespondensi, netralitas geografis, visibilitas, otonomi fiskal, administrasi pajak daerah, keseimbangan fiskal vertikal, dan keseimbangan fiskal horizontal. Prinsip-prinsip tersebut nantinya dapat mewujudkan pemerintah daerah akan keberhasilan pelaksanaan desentralisasi dimana salah satu poin pentingnya adalah terkait kemampuan keuangan dan kewenangan fiskal daerah untuk memberi pelayanan publik kepada masyarakat secara optimal. Meskipun otonomi yang diberikan kepada pemerintah daerah adalah seluas-luasnya, pengelolaan keuangan daerah juga harus dilakukan dengan tanggung jawab sebesar- besarnya (Khusaini, 2018). Pertanggungjawaban penggunaan APBD tertuang pada laporan realisasi anggaran maupun laporan kinerja pemerintah daerah dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Adanya penilaian kinerja keuangan daerah pada periode lampau berguna untuk pengambilan keputusan di masa depan, penilaian sumber-sumber ekonomi, hingga menganalisis penggunaan dana ( Harjito & Martono, 2011). Oleh karena itu, program atau kegiatan dapat dikatakan berhasil apabila telah memenuhi aspek 3E yaitu: Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas (*Value for Money*).

Pada sisi lainnya realisasi belanja daerah yang mengindikasikan kinerja keuangan Pemerintah Kota Makassar, nilai realisasi belanja daerah Kota Makassar mencapai lebih dari Rp.3,15 Triliun pada Tahun 2021 dan lebih dari 3,54 triliun pada tahun 2022, meningkat cukup besar jika

dibandingkan realisasi di Tahun 2020 yang berada di kisaran Rp.2,96 Triliun, hal yang wajar dikarenakan kondisi pada saat itu alokasi penggunaan anggaran pun difokuskan kepada situasi pandemic Covid-19 yang melanda seluruh dunia, realisasi belanja daerah Kota Makassar di tahun 2021 bertumbuh sebesar 6,08% dari tahun sebelumnya dan naik lagi di tahun 2022 menjadi 12,66% dari tahun sebelumnya yang menandakan bahwa kondisi keuangan mulai membaik sehingga kinerja keuangan juga ikut membaik.

Kinerja keuangan Pemerintah Kota Makassar dalam lima tahun terakhir sangat mengalami pasang surut, hasil ini tentu akan berimbas ke berbagai sektor termasuk efeknya pada ketimpangan pendapatan di Kota Makassar. Ketimpangan merupakan suatu fenomena yang terjadi hampir di seluruh lapisan negara di dunia, baik itu negara miskin, negara sedang berkembang, maupun negara maju, hanya yang membedakan dari semuanya itu yaitu besaran tingkat ketimpangan tersebut, karenanya ketimpangan itu tidak mungkin dihilangkan namun hanya dapat ditekan hingga batas yang dapat ditoleransi.

Perbedaan kemajuan antar wilayah yang berarti tidak samanya kemampuan untuk bertumbuh yang analog dengan kesenjangan, sehingga yang timbul adalah ketidakmerataan. Teori Kurva U terbalik (*U reverse*) Kuznet yaitu pertumbuhan ekonomi suatu negara akan mendorong peningkatan ketimpangan antar wilayah dalam negara tersebut pada tahap

awal pembangunan ekonomi, dan akan secara bertahap menurun saat pembangunan ekonomi mencapai titik stabil (Kuncoro, 2006).

Ketimpangan pendapatan di Kota Makassar mengalami tingkat ketimpangan yang sangat besar di tahun 2018 0,383 naik menjadi 0,4 di tahun 2020 dari dampak masa pandemi membuat jurang ketimpangan pendapatan di Kota Makassar semakin meningkat. Hasil ini tidak lepas dari tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar yang mengalami penurunan.

Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Dalam dunia nyata, amat sulit untuk mencatat jumlah unit barang dan jasa yang dihasilkan selama periode tertentu. Kesulitan ini muncul bukan saja karena jenis barang dan jasa yang dihasilkan sangat beragam, tetapi satuan ukurannya pun berbeda. Karena itu angka yang digunakan untuk menaksir perubahan output adalah nilai moneterinya (uang) yang tercermin dalam nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, nilai PDB yang digunakan adalah PDB berdasarkan harga konstan, sebab dengan menggunakan harga konstan, pengaruh perubahan harga telah dihilangkan, sehingga sekalipun angka yang muncul adalah nilai uang dari total output barang dan jasa, perubahan nilai PDB sekaligus menunjukkan perubahan jumlah kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan selama periode tertentu.

Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mengalami peningkatan dari

tahun 2020 ke tahun 2022. Pada tahun 2020, ekonomi Kota Makassar mengalami penurunan, yang ditandai dengan angka pertumbuhan ekonomi yang minus (-1,27%), namun pada tahun 2021, angka pertumbuhan ekonomi mulai membaik, dan mencatatkan angka 4,47% dan naik lagi di tahun 2022 menjadi 5,39%. Hal ini mengindikasikan adanya percepatan dalam hal pemulihan ekonomi di Kota Makassar.

Kesejahteraan seringkali dilihat dari persepektif pembangunan manusia. Indikator yang paling luas digunakan untuk mengukur status komparatif pembangunan sosio – ekonomi disajikan dalam laporan – laporan tahunan *United Nations Development Programme* (UNDP) yang berjudul *Human Development Report* (Laporan Pembangunan Manusia). Inti semua laporan ini, yang dimulai pada tahun 1990 adalah pembuatan penyempurnaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / *Human Deveploment Index* (HDI) (Todaro & Smith, 2011). Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.

Sejak pandemi melanda Indonesia, gini ratio yang awalnya berada di angka 0,380 pada September 2019 naik menjadi 0,381 pada Maret 2020. Kenaikan gini ratio kembali terjadi pada September 2020, yakni meningkat menjadi 0,385. Namun, trend kenaikan tidak lagi terjadi pada Maret 2021, gini ratio menunjukkan perbaikan, turun ke angka 0,384. Jika diliat berdasarkan wilayah, gini ratio pedesaan juga mulai membaik, data terakhir

pada Maret 2021 menunjukkan gini ratio pedesaan turun ke angka 0,315.

Penurunan aktivitas ekonomi karena inisiatif masyarakat sendiri seperti awal masuknya pandemi maupun aturan pemerintah yang bersifat memaksa, menghentikan saat itu juga aktivitas-aktivitas ekonomi yang utamanya berada di sektor-sektor informal, akibatnya banyak pekerja kehilangan pekerjaan, para pekerja ini umumnya berada di sektor UMKM dan jasa yang banyak mendominasi ekonomi kota di Indonesia.

Meskipun aktivitas sektor informal mulai berangsur pulih, sektor formal membutuhkan waktu yang relatif panjang untuk *recovery*. Hingga saat ini, efisiensi usaha di sektor formal terutama pemangkasan pekerja masih terus dilakukan, akibatnya banyak pekerja formal yang kehilangan pekerjaan dan belum beraktivitas kembali seperti semula. Berbeda dengan wilayah desa, meskipun pandemi, pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat tidak sebesar yang terjadi di wilayah kota, sektor pertanian yang umumnya mendominasi wilayah pedesaan relatif berjalan seperti biasanya, bahkan sektor pertanian di level nasional secara tahunan masih mengalami pertumbuhan.

Konteks indeks pembangunan di Kota Makassar dengan melihat sejumlah faktor yang dipacu untuk mendukung Indeks Pembangunan Manusia agar terus bergerak positif. Capaian IPM di Kota Makassar berada pada kategori sangat tinggi di tiap tahunnya yang pada tahun 2022 IPM Kota Makassar mencapai 83,12 dengan angka pertumbuhan IPM 0,56%, hanya pada tahun 2020 IPM di Kota Makassar mengalami penurunan akibat

dampak pandemi Covid-19, angka ini menunjukkan kesejahteraan masyarakat di Kota Makassar.

Badrudin (2012) dalam disertasinya yang meneliti tentang Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah, menunjukkan bahwa pengelolaan APBD menjadi sangat penting bagi pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah karena desentralisasi fiskal yang dijalankan di Indonesia adalah desentralisasi fiskal di sisi pengeluaran yang didanai terutama melalui transfer ke daerah, maka pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dalam mengelola APBD hendaknya mampu memenuhi prinsip dasar atau asas-asas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien, efektif, akuntabilitas, dan partisipatif. Kelima prinsip ini harus tercermin dalam setiap implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah, baik dalam konteks penyusunan RAPBD, proses penetapan APBD/pelaksanaan APBD, maupun pertanggungjawaban APBD.

Cahyono (2014) melakukan sebuah studi eksploratori mengenai Fiskal Stress dan Alokasi Tanggung Jawab Pengeluaran antara Pemerintah Negara Bagian dan Lokal. Secara khusus, penelitian ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana caranya tekanan fiskal tingkat negara bagian membentuk alokasi tanggung jawab pengeluaran antar negara dan sektor lokal. Dalam hal ini, studi membuat dua kontribusi utama. Pertama, telah menunjukkan bahwa, secara umum, sektor publik negara-daerah umumnya

cenderung menjadi lebih terdesentralisasi ketika pemerintah negara bagian berada dalam kondisi fiskal yang sulit. Dalam hal kategori pengeluaran fungsional, bagian negara bagian dari pembangunan, publik keamanan, dan pengeluaran alokasi berkurang sebagai pemerintah negara bagian menyesuaikan diri dengan kapasitas fiskal. Namun, kondisi fiskal tingkat negara bagian tidak memiliki efek sistematis pada peran negara dalam pengeluaran redistribusi dan pembiayaan pendidikan daerah.

Sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah bahwa sasaran ekonomi makro dan sasaran sektoral pembangunan nasional adalah pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi makro, neraca pembayaran, ketenagakerjaan dan kemiskinan. Dalam banyak kesempatan pemerintah selalu menekankan pada pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan/pengangguran dan kemiskinan yang populer disebut *triple track strategy* (*pro growth, pro job dan pro poor*) (Bappenas, 2011).

Untuk mencapai hal tersebut salah satu caranya adalah melalui kebijakan pengalokasian anggaran yang digambarkan dalam pengeluaran pemerintah baik APBN maupun APBD. Walaupun keberhasilan program-program tersebut sangat tergantung pada kebijakan masing-masing pemerintah daerah seiring dengan kebijakan otonomi daerah, namun pemerintah pusat masih dapat mengintervensinya dengan berbagai kebijakan fiskal untuk mencapai keberhasilan program tersebut. Kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui alokasi sumber-sumber pendanaan pada program dan kegiatan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat

(kepentingan publik) sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketimpangan pendapatan.

Peranan pemerintah dalam bidang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Salah satu bentuk peran pemerintah secara langsung adalah dengan intervensi anggaran (*budget interventions*) melalui kebijakan fiskal (*fiscal policies*). Kebijakan fiskal dapat dilakukan dengan kebijakan perpajakan, kebijakan bukan pajak, kebijakan anggaran belanja negara maupun kebijakan pembiayaan anggaran termasuk transfer. Sedangkan peran pemerintah secara tidak langsung dapat ditempuh melalui berbagai regulasi atau peraturan pemerintah.

Beranjak dari konsep dan implementasinya dalam desentralisasi fiskal, fiskal stress, kinerja keuangan daerah, besarnya transfer dana didaerah dan kemungkinan peningkatan potensi PAD seharusnya memiliki korelasi yang positif terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tercermin melalui pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga pengaruh desentralisasi fiskal, fiskal stress dan kinerja keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar menarik untuk diteliti.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah Desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Kota Makassar?
2. Apakah Fiskal stress berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Kota Makassar?
3. Apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Kota Makassar?
4. Apakah Desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar?
5. Apakah Fiskal stress berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar?
6. Apakah Kinerja keuangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar?
7. Apakah Desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Makassar?
8. Apakah Fiskal stress berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Makassar?
9. Apakah Kinerja keuangan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Makassar?
10. Apakah Ketimpangan pendapatan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Makassar?
11. Apakah Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Makassar?

12. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan?
13. Apakah Desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat melalui ketimpangan pendapatan di Kota Makassa?
14. Apakah Fiskal stress berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat melalui ketimpangan pendapatan di Kota Makassar?
15. Apakah Kinerja keuangan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat melalui ketimpangan pendapatan di Kota Makassar?
16. Apakah Desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi di Kota Makassa?
17. Apakah Fiskal stress berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar?
18. Apakah Kinerja keuangan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Pengaruh Desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan di Kota Makassar
2. Untuk menganalisis Pengaruh Fiskal stress terhadap ketimpangan pendapatan di Kota Makassar
3. Untuk menganalisis Pengaruh Kinerja keuangan terhadap ketimpangan pendapatan di Kota Makassar
4. Untuk menganalisis Pengaruh Desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar
5. Untuk menganalisis Pengaruh Fiskal stress terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar
6. Untuk menganalisis Pengaruh Kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar
7. Untuk menganalisis Pengaruh Desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Makassar
8. Untuk menganalisis Pengaruh Fiskal stress terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Makassar
9. Untuk menganalisis Pengaruh Kinerja keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Makassar
10. Untuk menganalisis Pengaruh Ketimpangan pendapatan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Makassar

11. Untuk menganalisis Pengaruh Pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Makassar
12. Untuk menganalisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan?
13. Untuk menganalisis Pengaruh Desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat melalui ketimpangan pendapatan di Kota Makassa
14. Untuk menganalisis Pengaruh Fiskal stress terhadap kesejahteraan masyarakat melalui ketimpangan pendapatan di Kota Makassar
15. Untuk menganalisis Pengaruh Kinerja keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui ketimpangan pendapatan di Kota Makassar
16. Untuk menganalisis Pengaruh Desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi di Kota Makassa
17. Untuk menganalisis Pengaruh Fiskal stress terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar
18. Untuk menganalisis Pengaruh Kinerja keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi:

1. Pemerintah Pusat sebagai masukan dalam menyelenggarakan otonomi daerah khususnya bagaimana pola hubungan pusat dan daerah yang mencerminkan rasa keadilan.
2. Pemerintah Daerah sebagai masukan dalam menjalankan otonomi daerah sehingga desentralisasi fiskal membawa manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.
3. Masyarakat umum sebagai masukan untuk memberikan kontrol terhadap pelaksanaan otonomi daerah
4. Peneliti dan akademisi sebagai bahan pembandingan maupun menstimulir penelitian yang berhubungan dengan desentralisasi fiskal, fiskal stres terhadap kesejahteraan masyarakat melalui ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

##### 2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan digagas oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling pada tahun 1976. Pada penelitiannya menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah persetujuan (kontrak) di antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen, dimana prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan atas nama prinsipal. Menurut Abidin (2016), teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen yang berakar dari teori ekonomi, teori keputusan, teori sosiologi dan teori organisasi. Teori keagenan dapat digunakan untuk memahami hubungan antara salah satu pihak (prinsipal) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit dengan pihak lain (agents) dengan harapan bahwa agen akan bertindak atau melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan principal (Abidin, 2016).

Menurut Carr & Brower (2000) dalam Abidin (2016), model keagenan yang sederhana mengasumsikan dua pilihan dalam kontrak : (1) *behavior-based*, yakni prinsipal harus memonitor perilaku agen dan (2) *Outcomebased*, yakni adanya insentif untuk memotivasi agen untuk mencapai kepentingan prinsipal. Dalam pemerintahan pihak yang berperan sebagai principal atau pemberi wewenang merupakan pemerintah pusat, sedangkan yang berperan sebagai agen atau yang melaksanakan

tugas/wewenang merupakan pemerintah daerah. Di sektor publik (pemerintahan) teori agensi ini melandasi bahwa masyarakat sebagai stakeholder utama pemerintah menginginkan pemerintah (agen) memberikan pelayanan publik yang maksimal (Elsye, 2013).

Tetapi pada teori ini juga terdapat adanya anggapan bahwa pihak agen tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan principal. Pihak agen mengelola pemerintahan daerahnya masih dengan ketergantungan pada pemberian bantuan dana transfer pemerintah pusat yang menyebabkan menjadi tidak mandirinya daerah tersebut. Perbedaan kepentingan antara principal dan agen ini menjadi dasar munculnya teori ini karena hubungan keagenan tersebut terkadang dapat menimbulkan masalah antara prinsipal dan agen.

Sebagai agen, pemerintah daerah secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan pendapatan daerah kepada pemerintah pusat (principal), namun disisi yang lain pemerintah daerah juga mempunyai kepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka. Dalam hal ini tentu saja dapat memunculkan kemungkinan besar agen tidak selalu menjalankan dan melakukan sistem pemerintahan yang terbaik demi kepentingan principal (Abidin, 2019).

### **2.1.2 Teori *Fiscal Federalisme***

Teori Fiscal Federalism diperkenalkan oleh Friedrich August Hayek pada tahun 1945. Pengambilan keputusan terdesentralisasi akan lebih mudah dilakukan jika menggunakan informasi yang efisien karena

pemerintah daerah lebih dekat hubungannya dengan masyarakat. Teori federalisme fiskal merupakan teori yang mengutamakan Desentralisasi Fiskal sebagai kunci dalam hal pembangunan. Teori federalisme fiskal menjelaskan bahwa desentralisasi disuatu daerah diharapkan mampu membuat masyarakat semakin sejahtera melalui pengelolaan terhadap pendapatan dan biaya antar pemerintah.

Menurut Amalia & Haryanto (2019), teori federalisme fiskal merupakan teori yang menjelaskan mengenai hubungan desentralisasi dengan perekonomian, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam berbagai kajian tentang federalisme fiskal (*fiscal federalism*), terdapat dua perspektif teori yang menjelaskan dampak ekonomi dari desentralisasi, yaitu *traditional theories (first generation theories)* dan *new perspective theories (second generation theories)* (Amalia & Haryanto, 2019). Penelitian ini dapat dijelaskan dengan menggunakan teori federalisme fiskal yaitu bagaimana pemerintah pusat merancang berapa alokasi anggaran yang akan diberikan kepada pemerintah daerah yang bisa digunakan sebagai pendapatan oleh pemerintah daerah tersebut sehingga program-program yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah dapat direalisasikan dengan baik dan sesuai rencana. Desentralisasi fiskal dapat dikatakan berjalan dengan baik jika pemerintah pusat benar-benar merancang alokasi anggaran yang akan diberikan kepada pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan yang ada di daerah (Ma & Mao, 2018).

Federalisme fiskal menampilkan model normatif yang menggambarkan pemerintah pusat sebagai penafsir arif aspirasi masyarakat, yang memberikan arahan dalam aturan-aturan kelembagaan antar pemerintahan untuk menjamin lembaga-lembaga pemerintah daerah bertindak sesuai keinginan pusat dengan asumsi sesuai keinginan seluruh rakyat.

### **2.1.3 Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Menurut Sen dalam (Pressman, 2002), kesejahteraan masyarakat adalah jumlah dari pilihan yang dimiliki masyarakat dan kebebasan untuk memilih di antara pilihan-pilihan tersebut dan akan maksimum apabila masyarakat dapat membaca, makan, dan memberikan hak suaranya. Menurut Todaro & Smith (2006), kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik meliputi peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan, serta memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.

Indikator kesejahteraan masyarakat yang hanya didasarkan pada PDB merupakan cara pandang yang terlalu sederhana dalam memahami

kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan model yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan memasukkan aspek harga lokal ke dalam PDB sehingga menjadi *purchasing power adjusted real PDB*. Formulasi PDB per kapita dengan memperhitungkan daya beli mengakibatkan PDB suatu wilayah menjadi lebih obyektif jika dibandingkan dengan PDB wilayah lain, namun tetap saja bahwa transformasi indikator PDB per kapita berdasarkan daya beli tetaplah dianggap subyektif karena ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi sangat ekonomi dan kuantitatif. Hal inilah yang kemudian memunculkan ukuran-ukuran yang baru mengenai indikator kesejahteraan masyarakat sebagai ukuran keberhasilan pembangunan.

#### **2.1.3.1 Teori Kesejahteraan Masyarakat**

Teori kesejahteraan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu *classical utilitarian*, *neoclassical welfare theory*, dan *new contractarian approach*. *Classical utilitarian* menekankan bahwa kepuasan atau kesenangan seseorang dapat diukur dan bertambah. Tingkat kepuasan setiap individu dapat dibandingkan secara kuantitatif. *Neoclassical welfare* menekankan pada prinsip *pareto optimality*. *Pareto optimum* didefinisikan sebagai sebuah posisi dimana tidak memungkinkan suatu relokasi input atau output untuk membuat seseorang menjadi lebih baik tanpa menyebabkan sedikitnya satu orang lebih buruk. *New contractarian approach* menekankan pada konsep dimana setiap individu memiliki kebebasan maksimum dalam hidupnya. Ketiga pandangan tersebut menekankan

bahwa tingkat kesejahteraan seseorang sangat tergantung pada tingkat kepuasan dan kesenangan yang diraih dalam kehidupannya.

#### **2.1.4 Desentralisasi Fiskal**

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu bentuk dan komponen utama dalam desentralisasi (Rondinelli, 2001). Kebijakan desentralisasi fiskal dilakukan untuk menghindari ketidakefektifan dan ketidakefisienan pemerintahan, ketidakstabilan ekonomi makro, dan ketidakcukupan pertumbuhan ekonomi (Bahl & Linn, 1992). Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk *surcharge of taxes*, pinjaman, maupun dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Ciri daerah yang didesentralisasi mempunyai sumber-sumber keuangan sendiri untuk membiayai pelaksanaan tugasnya (H. Setiawan, 2013). Prinsip yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, *money should follow function* yaitu setiap pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut (Bahl & Linn, 1992). Otonomi daerah tanpa desentralisasi fiskal kurang mendukung tercapainya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Saragih, 2003). Oleh sebab itu, otonomi daerah membutuhkan kebijakan desentralisasi fiskal. Kebijakan desentralisasi fiskal bertujuan untuk

memampukan keuangan daerah di dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya, terutama dalam mencapai standar pelayanan minimum (Subiyantoro et al., 2004). Hal ini diwujudkan dalam suatu kebijakan yang disebut dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (Mardiasmo, 2004). Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, menjelaskan bahwa “Konsekuensi dari pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah otonom, tidak lain adalah penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan.” Untuk merealisasikan ketentuan tersebut, maka pemerintah mengeluarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat-Daerah.

Desentralisasi fiskal adalah pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan yang sebelumnya tersentralisasi baik secara administrasi dan pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat. Dengan terjadinya pelimpahan sebagian kewenangan terhadap sumber-sumber penerimaan negara kepada pemerintahan di daerah, diharapkan daerah-daerah akan dapat melaksanakan tugas-tugas rutin, pelayanan publik dan meningkatkan investasi yang produktif di daerahnya (Elmi, 2002). Ebel (2000) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal terkait dengan masalah: 1) pembagian peran dan tanggung jawab antarjenjang pemerintahan, 2) transfer antarjenjang pemerintahan, 3) penguatan sistem pendapatan daerah atau perumusan sistem pelayanan publik di daerah, 4) swastanisasi

perusahaan milik pemerintah (terkadang menyangkut tanggung jawab pemerintah daerah), dan 5) penyediaan jaring pengaman sosial.

Kebijakan desentralisasi fiskal dimaksudkan untuk memecahkan masalah kekurangan pendapatan (Badan Kebijakan Fiskal RI, 2021), mengatasi eksternalitas dan melakukan redistribusi pendapatan nasional (Fisher, 1996), serta menstabilkan ekonomi makro (Davoodi & Zou, 1998). Anggaran untuk pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan atau pelayanan publik sedapat mungkin dikelola secara efisien, namun menghasilkan output yang maksimal (Mardiasmo, 2004).

Desentralisasi fiskal di Indonesia masih berada dalam tingkat sentralistis, sebab hampir tiga perempat (75%) total pengeluaran negara secara langsung ditentukan pusat, dan lainnya sebesar 10% ditransfer ke pemerintah daerah. Namun secara efektif, penggunaannya dikontrol oleh pusat. Bahkan yang masih tersisa sebesar 15% total dari pengeluaran negara, juga banyak dipengaruhi oleh pusat melalui proses perencanaan sampai dengan persetujuan APBN. Dengan demikian, secara keseluruhan, distribusi dari tanggung jawab pengeluaran anggaran masih tetap sangat sentralistis (Shah et al., 1994).

#### **2.1.5 *Fiscal Stress***

*Fiscal stress* merupakan suatu kondisi yang bersifat dinamis sehingga menimbulkan beberapa aspek dan interpretasi dalam mendefinisikannya (Rakabe, 2013). *Fiscal stress* adalah suatu kondisi ketidakseimbangan antara pelayanan yang diinginkan oleh publik dengan

apa yang pemerintah berikan dengan sumber daya yang tersedia (Aripin et al., 2021). Arnett (2011) mendefinisikan *fiscal stress* adalah sebagai kondisi dimana pemerintah tidak mampu untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang dan pemerintah juga tidak mampu meningkatkan penerimaan daerahnya atau menyediakan barang dan jasa (pelayanan) publik yang dibutuhkan oleh masyarakat (Arnett, 2011).

Indikasi adanya *fiscal stress* dapat dilihat ketika pengeluaran daerah (dalam hal ini belanja modal) mengalami peningkatan, namun apabila tidak diimbangi dengan adanya sumber pendapatan daerah yang memadai maka hal ini dapat memicu terjadinya kondisi *fiscal stress*. *Fiscal stress* menjadi semakin tinggi dikarenakan adanya tuntutan peningkatan kemandirian yang ditujukan dengan meningkatnya penerimaan sendiri untuk membiayai berbagai pengeluaran yang ada. Ketersediaan sumber-sumber daya daerah potensial dan kesiapan daerah menjadi faktor penting keberhasilan dalam era otonomi. Kondisi *fiscal stress* menyebabkan Pemerintah Daerah berada pada kondisi yang belum sepenuhnya mampu mendanai pembangunan yang ada di daerah. Artinya, Pemerintah Daerah masih sangat tergantung pada bantuan dari Pusat. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah belum menggali sumber-sumber penghasilan yang ada di daerah secara optimal. Oleh sebab itu kondisi *fiscal stress* ini menyebabkan Pemerintah Daerah wajib menggali sumber-sumber penghasilan yang berpotensi untuk dipungut sebagai Pendapatan Asli

Daerah. Dengan peningkatan dari Pendapatan Asli Daerah maka diharapkan Pemerintah Daerah dapat mendanai pembangunan dan pelayanan publik di daerah tanpa mengandalkan bantuan dari Pusat, sehingga kondisi fiscal stress tersebut akan berkurang.

Pada saat terjadinya *fiscal stress*, pemerintah cenderung menggali potensi penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan daerahnya. Oleh karena itu, tingginya angka upaya pajak dapat diidentikkan dengan kondisi fiscal stress. Upaya Pajak (*tax effort*) adalah upaya peningkatan pajak daerah yang diukur melalui perbandingan antara hasil penerimaan (realisasi) sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. *Tax effort* menunjukkan upaya pemerintah untuk mendapatkan pendapatan bagi daerahnya dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki. Potensi dalam pengertian ini adalah seberapa besar target yang ditetapkan pemerintah daerah dapat dicapai dalam tahun anggaran daerah tersebut.

### **2.1.6 Kinerja Keuangan**

Kinerja keuangan daerah dapat dilihat dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD). SKPD merupakan pusat pertanggungjawaban yang di pimpin oleh seorang kepala satuan kerja dan bertanggungjawab atas entitasnya. SKPD adalah unit kerja pemerintah daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.

Menurut Halim (2008:230) salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melaksanakan analisis rasio

terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan swasta (Halim, 2008).

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

#### **2.1.6.1 Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah**

Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi. Pandangan tradisional terhadap pengukuran kinerja organisasi sering hanya menekankan pada minimisasi biaya (input), misalnya dengan penghematan biaya operasional. Sistem pengukuran kinerja modern selain menilai input dan output juga menilai tingkat

fleksibilitas organisasi melayani pelanggan. Dalam melakukan pengukuran kinerja pada pemerintah sudah selayaknya meninggalkan pandangan tradisional dan beralih pada pandangan modern. Hal ini karena semua jasa dan produk yang dihasilkan pemerintah ditujukan untuk memenuhi harapan dan keinginan pelanggan atau masyarakat.

Menurut Mahsun (2006:25) mendefinisikan "Pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan" (Mahsun, 2006).

Setiap kegiatan organisasi harus dapat diukur dan dinyatakan keterkaitannya dengan pencapaian arah organisasi di masa yang akan datang yang dinyatakan dalam visi dan misi organisasi. Produk dan jasa yang dihasilkan diukur berdasarkan kontribusinya terhadap pencapaian visi dan misi organisasi. Dalam penerapannya, dibutuhkan suatu artikulasi yang jelas mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran yang dapat diukur dari satu dan keseluruhan program yang dilaksanakan. Dengan demikian, pengukuran kinerja organisasi merupakan dasar yang *reasonable* untuk pengembalian keputusan.

### 2.1.7 Ketimpangan Pendapatan

Pembangunan jangka panjang agar terlepas dari *Middle Income Trap*, perhatian lebih sering terfokus pada pertumbuhan. Agar pertumbuhan ekonomi kokoh dalam jangka panjang, pembangunan harus bersifat inklusif, berkualitas, dengan kesetaraan semua pelaku pembangunan. Salah satu indikator untuk menuju kesetaraan dalam pembangunan tersebut adalah distribusi pendapatan masyarakat yang umumnya digunakan ketimpangan sebagai ukurannya.

*Asian Development Bank* (2013) melaporkan bahwa ketimpangan yang tinggi dan terus meningkat merupakan faktor yang menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan yang tinggi dapat mengakibatkan terjadinya berbagai konflik sosial, rapuhnya ikatan kebersamaan, pemogokan buruh, tingginya angka kriminalitas, bahkan sampai pada hilangnya kepercayaan terhadap berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah karena masyarakat telah menjadi apatis. Kondisi ini akan berdampak buruk pada proses pembangunan. Jika tidak ada upaya perbaikan kebijakan, akan menjadi suatu “lingkaran setan”. Pertumbuhan yang tidak berkualitas akan menyebabkan meningkatnya ketimpangan; dan ketimpangan yang tinggi akan mengganggu proses pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah, maka semakin jauh harapan untuk menjadi negara yang mampu keluar dari suatu jebakan negara kelas menengah atau sering disebut *Middle Income Trap* (MIT) (*Asian Development Bank*, 2013).

*World Economic Forum (WEF)* (2014) telah menempatkan ketimpangan sebagai risiko global yang harus diwaspadai. Dalam laporan tersebut WEF telah menempatkan disparitas pendapatan yang parah (*severe income disparity*) menempati peringkat 4 dari 10 risiko global yang menempati prioritas tinggi pada tahun 2014. Disparitas pendapatan yang parah akan menyebabkan gangguan stabilitas sosial dan politik, yang selanjutnya akan mengganggu tata kelola pemerintahan yang baik. Gangguan dalam tata kelola pemerintahan yang baik, akan merembet ke krisis fiskal. Berbagai gangguan ini akan menyebabkan tekanan pada pasar tenaga kerja, mengakibatkan turunnya pendapatan, dan semakin memperparah ketimpangan (Schwab, 2014).

Negara-negara maju yang telah lolos dari *Middle Income Trap* (MIT), mulai khawatir akan semakin meningkatnya ketimpangan. Seperti disampaikan Bahagijo et al, (2012) pada Desember 2013, dalam sebuah pidato Presiden Obama menyatakan bahwa mengatasi ketimpangan merupakan “tantangan utama” dan dia akan sungguh-sungguh memfokuskan diri untuk persoalan ini. Obama menguraikan bukti-bukti mengapa permasalahan ini penting. “Kelompok 10 persen tidak saja telah memperoleh sepertiga dari pendapatan kita, kini mereka meraup separuh. Di masa lalu, rata-rata CEO menerima 20 sampai 30 kali lipat (dibanding) pendapatan rata-rata pekerja, kini mereka menerima 273 kalinya. Dan para keluarga dari kelompok 1 persen terkaya, memiliki kekayaan 288 kali

ketimbang pendapatan rata-rata keluarga di AS” (Prasetyantoko et al., 2012).

Ketimpangan mempunyai konsep yang lebih luas dibanding kemiskinan. Ketimpangan merupakan ukuran untuk semua populasi, tidak hanya terfokus pada rumah tangga miskin. Cara mengukur ketimpangan yang paling sederhana adalah dengan mengurutkan populasi dari yang termiskin sampai dengan yang terkaya berdasarkan pengeluaran (atau pendapatan). Kemudian dikelompokkan dalam 5 kelompok (kuintil) atau 10 kelompok, dihitung prosentase masing-masing kelompok terhadap total pengeluaran. Dengan 5 kelompok (kuintil) biasanya kelompok termiskin berada 6 – 10 persen dari total pengeluaran, sementara kelompok terkaya berkisar 35 – 50 persen (Haughton, 2012).

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek penting sebagai ukuran pemerataan pendapatan masyarakat di suatu negara. Sebagai ukuran pemerataan yang juga merefleksikan ukuran ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat, yang paling umum biasanya digunakan koefisien Gini (*Gini Ratio*). Nilai koefisien Gini berkisar antara 0 (sangat merata) sampai dengan 1 (sangat timpang). Ketimpangan pendapatan masyarakat dikatakan rendah apabila koefisien Gini dibawah 0,3. Ketimpangan pendapatan masyarakat berada pada tahap sedang apabila koefisien Gini berada pada rentang 0,3 sampai dengan 0,5. Ketimpangan pendapatan masyarakat berada pada tahap tinggi atau sangat timpang, apabila koefisien Gini diatas 0,5.

Sementara itu Asian Development Bank (2012) menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan yang umumnya menggunakan ukuran Gini ratio, dapat diukur dengan pendapatan per kapita atau pengeluaran per kapita. Dua pendekatan ini memberikan hasil yang berbeda. Ketimpangan dengan pendekatan pendapatan biasanya akan memberikan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendekatan pengeluaran. Pada kebanyakan negara-negara berkembang di Asia, ketimpangan pada umumnya menggunakan pendekatan pengeluaran, dengan pengecualian untuk Malaysia dan Taipei, China yang menggunakan pendekatan pendapatan. Demikian juga untuk negara-negara di Afrika Sub-Sahara juga digunakan pendekatan pengeluaran. Sedangkan untuk negara-negara Amerika Latin dan OECD digunakan pendekatan pendapatan. Perbedaan pendekatan penghitungan ini ditentukan oleh ketersediaan data. Data pendapatan pada umumnya lebih sulit diperoleh, dibanding dengan data pengeluaran. Gini ratio di Filipina pada tahun 2009 dengan pendekatan pendapatan sebesar 47 persen, sedangkan dengan pendekatan pengeluaran hanya sebesar 43 persen. Di Vietnam pada tahun 2008 memberikan hasil yang lebih mencolok. Gini ratio dari pendekatan ukuran pendapatan diperoleh nilai sebesar 46 persen, sedangkan dengan pengeluaran hanya sebesar 37 persen (*Asian Development Bank, 2013*).

### **2.1.8 Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Todaro (2006) pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan kapasitas produktif dalam suatu perekonomian secara

terus menerus atau berkesinambungan sepanjang waktu sehingga menghasilkan tingkat pendapatan dan output nasional yang semakin lama semakin besar. Sejalan dengan pendapat Anwar (2018), bahwa pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas suatu perekonomian untuk memproduksi barang dan jasa untuk dibandingkan pada tiap-tiap periode. Tiga komponen pertumbuhan ekonomi yang penting bagi setiap masyarakat adalah (1) akumulasi modal, termasuk di dalamnya semua investasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia melalui perbaikan di bidang kesehatan, pendidikan dan keterampilan kerja, (2) pertumbuhan jumlah penduduk yang pada akhirnya menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja, (3) kemajuan teknologi yang secara luas diartikan sebagai cara baru dalam menyelesaikan pekerjaan (Todaro & Smith, 2006).

Menurut Sadono Sukirno (2013:9), pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Secara konvensional, pertumbuhan ekonomi suatu negara diukur sebagai peningkatan persentase dari Produk Domestik Bruto (PDB), begitu juga untuk tingkat regional (daerah) dapat diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDB sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian, tujuan PDB adalah meringkas aktivitas (Mankiw, 2007).

### 2.1.8.1 Teori Neo Klasik

Menurut Teori Neo klasik, pertumbuhan ekonomi tergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi: penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal dan tingkat kemajuan teknologi (Arsyad, 2010). Analisis teori ini didasarkan pada asumsi-asumsi dari teori klasik yaitu bahwa perekonomian berada pada tingkat pengerjaan penuh (*full employment*) dan tingkat penggunaan penuh (*full utilization*) dari faktor-faktor produksinya. Model ini menjelaskan bahwa teknologi yang digunakan menentukan besarnya output yang diproduksi dari jumlah modal dan tenaga kerja tertentu.

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik tentu saja merupakan sesuatu yang sangat dicita-citakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi juga sangat diharapkan dapat tercapai. Adapun indikasi dari pembangunan ekonomi adalah peningkatan produktivitas serta pendapatan perkapita yang berujung pada peningkatan kesejahteraan. Dalam usaha peningkatan pembangunan ekonomi, Pemerintah berupaya mengelola sumber daya dengan sebaik mungkin melalui berbagai cara, salah satunya dengan cara bermitra dengan masyarakat guna membuka lapangan pekerjaan baru di daerah tersebut. Pada umumnya, peningkatan pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh peningkatan belanja modal meskipun terkadang jumlahnya tidak terlalu signifikan.

### **2.1.8.2 Teori Klasik**

Menurut Boediono (2018:7), Adam Smith merupakan orang pertama yang mengungkapkan proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang secara sistematis yang terdiri dari dua aspek utama yaitu pertumbuhan output (GDP) dan pertumbuhan penduduk (Boediono, 2018). Perhitungan output dapat digunakan pada tiga variabel yaitu sumberdaya alam, sumber daya manusia, dan persediaan modal. Sedangkan pada pertumbuhan penduduk, dilakukan dalam menentukan luas pasar dan laju pertumbuhan ekonomi. Menurut Smith makin besar kemungkinan dilakukannya spesialisasi dan pembagian kerja, semakin tinggi produktivitas per pekerja.

Adanya pembagian kerja juga harus diimbangi dengan akumulasi modal. Perluasan juga perlu dilakukan agar dapat menampung hasil produksi. Perluasan pasar bisa dilakukan dengan adanya perdagangan internasional. Adam Smith juga berpendapat bahwa proses pertumbuhan terjadi secara simultan dan memiliki hubungan keterkaitan satu dengan yang lain. Timbulnya peningkatan kinerja pada satu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi pemupukan modal, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi dan memperluas pasar sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat. Namun pertumbuhan ekonomi terdapat kendala yaitu keterbatasan sumber daya yang merupakan faktor yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi bahkan perkembangannya dapat menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi.

### **2.1.8.3 Teori Rostow dan Musgrave**

Teori Rostow and Musgrave dalam Mangkoesoebroto (2001) yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi. Kemudian pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat, tetapi pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar. Sebenarnya peranan pemerintah juga tidak kalah besar dengan peranan swasta. Semakin besarnya peranan swasta juga banyak menimbulkan kegagalan pasar yang terjadi (Mangkoesoebroto, 2001).

### **2.1.8.4 Teori Pertumbuhan Endogen**

Teori pertumbuhan endogen yang dipelopori oleh Romer (1986) dan Lucas (1988) memiliki peran dalam menjelaskan model pertumbuhan yang lebih maju, dimana perubahan teknologi bersifat endogen (berasal dari dalam sistem ekonomi) dan memiliki pengaruh pada pertumbuhan jangka panjang. Pengertian modal dalam model ini tidak sekedar modal fisik (*physical capital*), tetapi mencakup pula modal manusia (*human capital*). Selain itu, teori ini mengasumsikan tingkat pengembalian yang meningkat (*increasing return to scales*) pada fungsi produksi agregatnya dan

menekankan peran eksternalitas dalam menentukan tingkat pengembalian investasi modal (Arsyad, 2010).

## **2.2 Hubungan Antar Variabel**

### **2.2.1 Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Lindahman dan Thurmaier (2002) meneliti tentang dampak desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur dari pencapaian masyarakat atas kebutuhan dasar (basic needs), yaitu pendidikan yang lebih baik dan penduduk yang sehat. Menggunakan variabel desentralisasi penerimaan dan pengeluaran untuk melihat variabel desentralisasi dan human development index untuk melihat basic needs. Hasil kajian empirik menemukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pencapaian kebutuhan dasar bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan argumentasi di mana desentralisasi fiskal akan membuat pemerintah daerah lebih mengetahui apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakatnya.

Saputra dan Mahmudi (2012) menemukan bahwa desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Sama halnya dengan Kusreni dan Suhab (2009) mengatakan bahwa kapasitas fiskal daerah memiliki hubungan positif searah dengan IPM.

### **2.2.2 Pengaruh Fiskal Stress Terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Pemerintah dituntut untuk mengelola sumber daya di daerahnya secara efisien. Pemerintah dalam merencanakan pembangunan harus mampu mengatasi permasalahan yang menghambat pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat. Sinuraya (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Timur Tahun 2014-2018). Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi melalui IPM pada kabupaten dan kota di Jawa Timur. Hal ini dipicu oleh pertumbuhan ekonomi di wilayah ini menunjukkan fluktuasi yang cenderung menurun sementara sumberdaya manusia yang dimiliki oleh kabupaten dan kota di Jawa Timur cukup melimpah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus meningkat. Sementara itu PAD, Dana Perimbangan, serta Belanja Daerah merupakan wujud dari desentralisasi fiskal yang merupakan salah satu alat untuk mencapai sebuah tujuan. Hasil penelitian menemukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dan positif terhadap IPM. Selanjutnya, desentralisasi fiskal memiliki hubungan langsung terhadap pertumbuhan ekonomi tanpa melalui mediasi IPM. Namun PAD tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara dana perimbangan memberikan pengaruh signifikan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, serta belanja modal memiliki

pengaruh signifikan positif bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten dan Kota di Jawa Timur selama periode tahun 2014-2018.

### **2.2.3 Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Kinerja keuangan daerah merupakan kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah untuk membiayai jalannya sistem pemerintahan, pembangunan daerahnya, pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan batas-batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Analisis terhadap kinerja keuangan merupakan informasi penting untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai apakah pemerintah daerah berhasil mengelola keuangannya dengan baik, serta memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berliani (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka, menemukan bahwa kinerja keuangan berpengaruh secara simultan dan berpengaruh positif secara parsial terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, yang artinya bahwa Kinerja keuangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan memberikan dampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Majalengka.

#### **2.2.4 Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Ketimpangan juga mempengaruhi kesejahteraan baik positif maupun negatif seperti yang dijelaskan oleh Subottina ketimpangan yang tinggi mengurangi golongan orang dengan akses kepada beberapa hal seperti tanah dan pendidikan sehingga mengurangi produktifitas yang selanjutnya akan mengurangi pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan yang tinggi juga mengancam stabilitas sosial ekonomi masyarakat karena semakin banyak orang yang tidak puas dengan status ekonomi mereka, yang membuat sulitnya tercapai kesepakatan politik antar kelompok dengan penghasilan yang tinggi terhadap kelompok yang berpenghasilan rendah (Rahmat, 2018).

Pengaruh positif ketimpangan terhadap kesejahteraan masyarakat juga dijelaskan Todaro (2006), dimana ada korelasi positif antara tingkat pendidikan seseorang dengan penghasilannya seumur hidup. Korelasi ini dapat dilihat terhadap lulusan sekolah tingkat atas (sekolah menengah atas dan universitas) dimana pendapatan mereka beberapa ratus persen lebih tinggi dibandingkan mereka yang hanya lulus sekolah dasar atau kurang dari itu. Hal ini disebabkan karena tingkat penghasilan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, jelas ketimpangan pendapatan akan bertambah buruk mengingat para pelajar yang berasal dari keluarga yang berpenghasilan tinggi jauh lebih besar peluangnya untuk meneruskan pendidikannya sampai ke jenjang yang tertinggi (Todaro & Smith, 2006).

Untuk meningkatkan kesejahteraan yang diukur dengan IPM dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi sebagai syarat perlu dan pemerataan pembangunan sebagai syarat cukup karena dengan pemerataan pembangunan terdapat jaminan bahwa semua penduduk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan (Badrudin, 2012).

Kesenjangan pembangunan antar wilayah merupakan suatu hal yang umum terjadi dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Kesenjangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografis yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Terjadinya kesenjangan/disparitas antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Alesina dan Rodric (dalam Patta, 2012) mengemukakan bahwa ketimpangan pendapatan akan berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemudian kesejahteraan masyarakat suatu wilayah pun akan mengalami penurunan. Sedangkan Patta (2012) dalam penelitiannya menemukan adanya hubungan negatif antara distribusi pendapatan dengan indeks pembangunan manusia di Sulawesi Selatan (Patta, 2012).

### **2.2.5 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran keadaan suatu perekonomian dari suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang

berkesinambungan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi daerah, indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di masa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan meningkatnya jumlah barang dan jasa (output) yang dihasilkan oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dari sudut tinjauan ekonomi dapat direfleksikan oleh pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. PDRB merupakan penjumlahan dari semua barang dan jasa akhir mencakup semua nilai tambah yang dihasilkan oleh daerah dalam periode satu tahun. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan perkembangan perekonomian dalam suatu daerah (Sita, 2016).

Selanjutnya ditambahkan oleh Mankiw (2006) indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam konteks ekonomi regional, ukuran yang sering dipergunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian di wilayah itu.

Pertumbuhan ekonomi (Economic Growth) juga merupakan perubahan nilai kegiatan ekonomi dari tahun untuk satu periode ke periode yang lain dengan mengambil rata-ratanya dalam waktu yang sama, maka untuk mengatakan tingkat pertumbuhan ekonomi harus dibandingkan dengan tingkat pendapatan nasional dari tahun ke tahun. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi daerah adalah penambahan pendapatan

masyarakat yang terjadi di daerah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (value added) yang terjadi di daerah tersebut. Pertambahan pendapatan itu diukur dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan.

Apabila pertambahan pendapatan masyarakatnya meningkat dapat diartikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia. Peran pemerintah dalam meningkatkan IPM juga dapat berpengaruh melalui realisasi belanja negara dalam pelayanan publik (Mirza, 2012). Peran pemerintah dalam kebijakan dan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal didasarkan pada pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya, sehingga pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Professor Kuznet salah satu karakteristik pertumbuhan ekonomi modern adalah tingginya pertumbuhan output perkapita (Todaro & Smith, 2011). Pertumbuhan output yang dimaksudkan adalah PDRB per kapita, tingginya pertumbuhan output menjadikan perubahan pola konsumsi dalam pemenuhan kebutuhan. Artinya semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka akan semakin tinggi pertumbuhan output per kapita dan merubah pola konsumsi dalam hal ini tingkat daya beli masyarakat juga akan semakin tinggi. Tingginya daya beli masyarakat akan

meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia karena daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator komposit dalam IPM yang disebut indikator pendapatan. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian yang dilakukan Sasana (2009) menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat (Sasana, 2009).

### **2.3 Tinjauan Empiris**

Dalam kajian empiris ini akan dijelaskan studi terdahulu yang berkaitan dengan studi tentang pengaruh desentralisasi fiskal, fiskal stress & kinerja keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar.

Bahasoan (2021), dalam penelitiannya *Effect of General Allocation Fund (DAU) and Capital Expenditure on Economic Growth in West Sulawesi Province Period 2015 – 2018*, menemukan hubungan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat (Bahasoan et al., 2021).

Nantharhat dkk (2020), melakukan penelitian yang berjudul desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi di thailand: Analisis lintas wilayah. Pengolahan data di penelitian ini menggunakan regresi *Panel Fully Modified Least Squares (FMOLS)* dan *Panel Dynamic Least Squares (DOLS)*, penelitian ini menemukan bukti empiris efek positif dari desentralisasi pendapatan, ketergantungan transfer, dan

ketidakseimbangan fiskal vertikal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di lima wilayah. Namun, studi ini juga menemukan bahwa desentralisasi pengeluaran berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi tingkat signifikansinya lemah. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pesat anggaran belanja pemerintah kota metropolitan setelah tahun-tahun transisi politik pada tahun 2006 dan 2014 telah menyebabkan stagnasi dalam investasi publik di tingkat lokal di seluruh negeri, sehingga mengakibatkan tertinggalnya output industri dan produk provinsi bruto. Kurangnya pengeluaran anggaran juga melemahkan permintaan dan menghambat pertumbuhan di bidang manufaktur, konstruksi, dan kegiatan real estat, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan fiskal dan kesenjangan pembangunan dalam perekonomian Thailand.

Zahari, Haryadi, & Syaparuddin (2018), melakukan penelitian tentang *Analysis of fiscal decentralization impact on community welfare in Jambi Province*. Penelitian ini menggunakan data panel, gabungan data time series tahun 2010-2016 dan cross section 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Metode analisis data adalah analisis deskriptif dan pendekatan analisis regresi data panel yaitu fixed effect model (FEM). Pengujian hipotesis menggunakan statistik uji F dan uji statistik t. Hasil penelitian ini menemukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Zahari et al., 2018).

Guandong Ma dan Jie Mao (2018), melakukan penelitian tentang *Fiscal Decentralization and Local Economic Growth: Evidence from a Fiscal*

*Reform in China*. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tergantung pada kualitas pemerintahan dan lebih menonjol di daerah dengan pemerintahan yang berkualitas tinggi. Hasil tersebut mengkonfirmasi pandangan yang mengatakan bahwa desentralisasi fiskal dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, namun tidak menjamin bahwa kebijakan pro bisnis akan disertai dengan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat (Ma & Mao, 2018).

Yanti (2022) dengan judul pengaruh dana transfer pusat ke daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil, tingkat pengangguran dan PDB deflator terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung yang menemukan hasil bahwa adanya hubungan positif dan signifikan antara dana transfer dengan pertumbuhan ekonomi, hubungan negatif dan signifikan antara PDB deflator terhadap pertumbuhan ekonomi (Yanti, 2022).

Lantemona et al (2020) pengaruh belanja modal, penyaluran kredit dan tingkat suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi sulawesi utara, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh belanja modal, kredit dan tingkat suku bungan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat, Adapun hasil yang diperoleh adalah Belanja Modal secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Artinya, semakin besar Belanja Modal akan meningkatkan

Pertumbuhan Ekonomi, *ceteris paribus*. Kredit secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Artinya, semakin besar Kredit akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, *ceteris paribus*. Tingkat Bunga secara parsial tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Artinya, jika terjadi perubahan Tingkat Bunga tidak akan menaikkan atau menurunkan Pertumbuhan Ekonomi, *ceteris paribus*. Belanja modal, kredit, dan tingkat bunga secara Bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara (Lantemona et al., 2020).

Yushkov (2015) melakukan penelitian untuk mengetahui hubungan desentralisasi Fiskal dengan pertumbuhan ekonomi di Rusia. Hasil dari penelitian ini adalah belanja Interregional pada desentralisasi berpengaruh negative dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi, ketergantungan region terhadap transfer pemerintah pusat positif dan signifikan terhadap pertumbuhan. Hal ini berarti pengeluaran pemerintah di Region Rusia terlalu berlebihan pada desentralisasi yang menyebabkan adanya hubungan negative antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi (Yushkov, 2015).

Kharisma (2013), melakukan penelitian yang berjudul Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebelum Dan Sesudah Era Desentralisasi Fiskal Di Indonesia. Menemukan bahwa Hasil studi mengenai pengaruh peran Pemerintah Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di era desentralisasi dapat disimpulkan sebagai

berikut: Pertama, berdasarkan hasil studi menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan desentralisasi selama periode 1995-2000, peran anggaran Pemerintah Daerah dari sisi penerimaan dan pengeluaran terhadap pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif, baik di tingkat nasional, di Jawa maupun luar Jawa. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengandalkan dan memobilisasi anggaran penerimaan dan pengeluaran daerah yang ada (Kharisma, 2013).

Badrudin (2012), melakukan penelitian yang berjudul pengaruh desentralisasi fiskal terhadap belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah. Menemukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan searah terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 s.d 2008 (Badrudin, 2012).

Bambang dan Mahmudi (2012) pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat menemukan hasil bahwa desentralisasi fiskal berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat (Saputra & Mahmudi, 2012).